

## **ANALISIS MAKRO PEMBIA YAAN PENDIDIKAN DI SMP**

**Eny Ratnawati<sup>1</sup>, Abd. Rachim<sup>2</sup>, Widyatmike Gede Mulawarman<sup>3</sup>, Warman<sup>4</sup>**

Universitas Mulawarman<sup>1234</sup>

e-mail: [enyratna1973@gmail.com](mailto:enyratna1973@gmail.com)<sup>1</sup>, [abd.rachim@gmail.com](mailto:abd.rachim@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anggana. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS untuk mendukung operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan di SMPN 1 Anggana. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Langkah-langkah penting dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, bendahara sekolah, serta beberapa informan kunci lainnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOS. Data sekunder juga dikumpulkan melalui telaah dokumen terkait. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara komprehensif dengan memfokuskan pada tiga aspek utama pengelolaan dana BOS, yaitu tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan atau penggunaan anggaran, dan tahap pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar, pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Anggana telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor <sup>1</sup> 2 Tahun 2022. Salah satu temuan penting adalah implementasi sistem Aplikasi Tata Kelola Keuangan Sekolah (ATKP) dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS, di mana tidak ditemukan adanya transaksi pembayaran secara tunai (cash). Selain itu, proses pertanggungjawaban penggunaan dana BOS juga telah dilaksanakan secara maksimal oleh pihak sekolah. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan keterlambatan proses pencairan dana BOS dari pihak pemerintah kabupaten. Keterlambatan ini berdampak pada kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan oleh sekolah. Simpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa SMPN 1 Anggana telah berupaya mengelola dana BOS dengan baik dan sesuai regulasi, namun efektivitasnya dapat lebih ditingkatkan dengan mengatasi kendala eksternal seperti keterlambatan pencairan dana.

**Kata Kunci:** *Pembinaan, Pendidikan, Pemerintah.*

### **ABSTRACT**

This study aims to conduct an in-depth analysis of the management of School Operational Assistance (BOS) funds at Anggana 1 State Junior High School. The background of this study is based on the importance of transparency and accountability in the use of BOS funds to support school operations and improve the quality of education. The main focus of this study is to examine how the BOS fund management process, from planning to accountability, is implemented at Anggana 1 State Junior High School. To achieve this goal, this study uses a qualitative-descriptive approach. Important steps in this study include collecting primary data through in-depth interviews with the principal, school treasurer, and several other key informants who are directly involved in the management of BOS funds. Secondary data is also collected through a review of related documents. Furthermore, data analysis is carried out comprehensively by focusing on three main aspects of BOS fund management, namely the Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan



budget planning stage, the budget implementation or use stage, and the accountability stage for the use of these funds. The results of the study indicate that in general, the management of BOS funds at SMPN 1 Anggana has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 12 of 2022. One important finding is the implementation of the School Financial Management Application (ATKP) system in the implementation of the use of BOS funds, where no cash payment transactions were found. In addition, the process of accountability for the use of BOS funds has also been carried out optimally by the school. However, this study also identified several obstacles faced, especially related to the delay in the disbursement of BOS funds from the district government. This delay has an impact on the smooth implementation of activities that have been budgeted by the school. The main conclusion of this study is that SMPN 1 Anggana has made efforts to manage BOS funds well and in accordance with regulations, but its effectiveness can be further improved by overcoming external obstacles such as delays in the disbursement of funds.

**Keywords:** *Financing, Education, Government.*

## PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan utama manusia adalah pendidikan agar mereka dapat berproses dan berinteraksi dengan masyarakat lain di seluruh dunia. Pendidikan juga merupakan salah satu bekal terpenting untuk masa depan. Di Indonesia, praktik pendidikan ini bahkan telah ada sejak sebelum negara memperoleh kemerdekaannya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan, mengingat kemampuannya untuk membentuk karakter seseorang jika mereka benar-benar mengikuti prosesnya.

Sebagai kelanjutan dari pentingnya karakter, pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran moral, pengetahuan, dan keterampilan. Proses ini berlangsung melalui pengajaran, pengamatan, pelatihan, atau penelitian Rahayut (dalam Aprilyanti et al. 2024). Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1), pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Usaha tersebut bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sejalan dengan definisi tersebut, pendidikan merupakan komponen penting dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan cita-cita luhur yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa yang berbudi luhur. Sumber daya manusia adalah modal dasar dan kekayaan suatu bangsa, sedangkan sumber daya modal dan materi adalah faktor produksi yang hanya dapat diaktifkan oleh sumber daya manusia. Dengan demikian, pendidikan juga merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dalam pembangunan bangsa maupun dalam tatanan global (Yulianti, 2017).

Untuk mewujudkan SDM berkualitas, sekolah hadir sebagai lembaga pendidikan yang kompleks dengan banyak dimensi yang saling berkaitan dan menentukan. Selain itu, sekolah memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain, seperti menjadi tempat belajar mengajar dan proses pemberdayaan kehidupan manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan unik, peran dan fungsi manajemen sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini, kepala sekolah bertanggung jawab untuk



merencanakan program, melaksanakan program, dan mengevaluasi pelaksanaannya, yang dikenal sebagai pengelolaan sekolah (Riski, 2018).

Selain manajemen yang baik, pengelolaan sekolah sangat bergantung pada kemampuan dan kreativitas guru, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Dua sumber daya yang sangat penting untuk kualitas pendidikan adalah sumber daya manusia dan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa penyelenggaraan pendidikan berkualitas tinggi seringkali memerlukan biaya yang tidak sedikit (Aflaha et al. 2021).

Mengingat pentingnya biaya, negara harus memberikan dana atau menjadi sumber dana utama untuk pendidikan guna memastikan terselenggaranya pendidikan berkualitas tinggi. Pendidikan berkualitas tinggi pada hakikatnya merupakan aset negara yang tak ternilai. Dalam konteks pembiayaan, dikenal adanya pembiayaan mikro pendidikan yang membahas pembiayaan terbatas pada suatu lembaga atau organisasi. Di sisi lain, terdapat pula pembiayaan makro pendidikan yang membahas pembiayaan pendidikan secara keseluruhan di suatu negara.

Lebih lanjut mengenai pembiayaan, ia merupakan elemen masukan instrumental (input instrumental) yang sangat penting untuk menyelenggarakan pendidikan (Waliyah et al., 2021). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan menetapkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pengelolaan keuangan sekolah saat ini (Rahmadoni, 2018). Pendidikan sangat bergantung pada pembiayaan, sehingga manajemen harus mengawasinya agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan Mesiono (dalam Hidayat et al. 2023).

Dengan demikian, salah satu input penting yang sangat krusial untuk pendidikan adalah pembiayaan pendidikan itu sendiri. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peran biaya; dengan demikian, proses pendidikan tidak akan berhasil tanpa dukungan finansial yang memadai. Secara umum, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas dengan semua komponennya saling berhubungan. Rentangnya meliputi dari tingkat mikro (satuan pendidikan) hingga tingkat makro (nasional) (Mutaqin et al, 2023).

Pada tingkat makro, pembiayaan pendidikan seringkali diatur atau dibagi menjadi tiga tingkatan: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Rahman 2021). Pemerintah daerah di setiap daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembiayaan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Pembiayaan pendidikan secara praktis berkaitan dengan proses perolehan dana (pendapatan) dan bagaimana dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai semua kebutuhan program pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan utama untuk setiap lembaga pendidikan formal umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, baik negara maupun daerah (Purba et al. 2024).

Meskipun demikian, masalah biaya pendidikan tidak hanya terjadi di perguruan tinggi tetapi juga dirasakan hingga tingkat pendidikan dasar. Walaupun pemerintah telah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP negeri, banyak keluarga dari kelas menengah ke bawah merasa dana tersebut belum cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai dengan peraturan pemerintah. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan sangat mendukung keberhasilan proses belajar mengajar (Madjid & Samsudin., 2021).

Kenyataannya, banyak sekolah yang dilaporkan belum memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal, baik dari segi efektivitas maupun efisiensinya. Menghadapi

tantangan ini, pemerintah daerah yang menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama, terus berupaya mengatasi masalah pembiayaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui perencanaan program yang matang dan pengelolaan anggaran yang baik. Pengelolaan keuangan pendidikan memang harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mengurangi tekanan biaya bagi siswa dan orang tua (Fadhila dan Lilia. 2024).

Sebagai contoh konkret pengelolaan di tingkat sekolah, pembiayaan pendidikan di SMPN 1 Anggana telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Anggaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus selaras dengan rencana tahunan sekolah. Hal penting yang harus diperhatikan saat membuat RKAS adalah bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan sekolah harus dapat dipenuhi setiap tahunnya. Selain itu, RKAS harus mencakup semua anggaran kegiatan rutin dan biaya penting lainnya, sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dalam satu tahun anggaran.

Lebih jauh, dana yang tersedia dari RKAS tersebut dapat sekaligus mencakup kegiatan pengembangan sekolah itu sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, di luar dari RKAS yang telah disusun untuk operasional rutin. Dana tertentu juga diperlukan agar sekolah dapat mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan dalam satu tahun pelajaran. Pemerintah pun sudah menetapkan standar jumlah dana bantuan yang akan diserahkan per siswa, yaitu sebesar Rp1.280.000,- per peserta didik untuk jenjang tertentu.

Dalam praktiknya, dengan membuat RKAS, setiap sekolah pada dasarnya telah menghitung secara cermat jumlah dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jumlah dana yang diperlukan untuk satu tahun pelajaran kemudian dibagi dengan jumlah siswa di kelas VII, VIII, dan IX di sekolah tersebut, sehingga menghasilkan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Akibatnya, jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah bisa sangat berbeda, karena jumlah siswa di setiap sekolah juga bervariasi. Oleh karena itu, SHPS (Satuan Harga Per Siswa) untuk setiap sekolah akan berbeda, meskipun untuk menjamin kualitas pendidikan, minimal ada patokan SHPS sebagai standar (Setyowati, et al, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengelolaan pembiayaan pendidikan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Anggana. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan secara komprehensif praktik pengelolaan dana BOS, mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori pengelolaan pembiayaan yang relevan. SMPN 1 Anggana, yang berlokasi di Jalan Kutai No 137 Anggana, dipilih sebagai lokus penelitian karena relevansinya dengan tema pendidikan, statusnya sebagai penerima dana BOS, serta telah mengimplementasikan aplikasi ATKP (non-tunai) untuk transaksi keuangannya selama dua tahun terakhir, sehingga tidak ada lagi transaksi keuangan secara tunai dan semua tercatat secara elektronik.

Untuk memperoleh pemahaman mendalam, pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan secara langsung di SMPN 1 Anggana dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena atau masalah terkait proses pengelolaan pembiayaan dana BOS, yang hasilnya didokumentasikan dalam catatan lapangan mencakup peristiwa, interaksi, dan prosedur pengelolaan. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab langsung, seperti bendahara BOS, untuk menggali informasi detail mengenai proses perencanaan, realisasi, pengawasan, dan pengendalian anggaran, di mana hasil wawancara ini ditulis secara sistematis dan ringkas.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, baik berupa kata-kata maupun dokumen, dianalisis untuk menemukan dan mengupas informasi terkait manajemen dana BOS di sekolah. Metode dokumentasi melibatkan pengamatan terhadap dokumen tertulis yang relevan, seperti catatan realisasi keuangan, Buku Kas Umum (BKU) BOS, dan kertas kerja rencana anggaran sekolah (RKAS). Kajian dokumen ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pelaksanaan dan gambaran lengkap terkait dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Anggana, guna mendukung temuan dari observasi dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Perencanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah langkah penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Perencanaan yang efektif akan membantu sekolah mencapai tujuan mereka.

Langkah-langkah yang dilakukan di SMPN 1 Anggana untuk merencanakan penggunaan dana BOS adalah melalui pemetaan kebutuhan Sekolah, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), keterlibatan semua pihak, transparansi dan akuntabilitas.

Pada pemetaan kebutuhan sekolah, SMPN 1 Anggana melakukan analisis strengths, weaknesses, opportunities, threats (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) untuk mengidentifikasi kondisi sekolah secara menyeluruh. Dilanjutkan dengan survei kepuasan dengan cara mengumpulkan masukan dari guru, siswa, orangtua, dan komite sekolah terkait kebutuhan yang belum terpenuhi. Selain itu juga menginventarisasi asset dengan cara melakukan pendataan terhadap aset sekolah yang sudah ada, baik berupa sarana prasarana maupun sumber daya manusia.

Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilandaskan pada memprioritaskan kebutuhan sekolah dengan cara mengurutkan kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi peningkatan mutu pendidikan. Serta pengalokasian anggaran dengan cara menentukan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan yang telah diprioritaskan, sesuai dengan jumlah dana BOS yang diterima. Selain itu dengan menyesuaikan dengan juknis, memastikan bahwa perencanaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam juknis (juklak) BOS yang berlaku.

Untuk penyusunan anggaran BOS, SMPN 1 Anggana melibatkan semua pihak yang ada di sekolah yaitu komite sekolah, guru dan siswa. Komite dapat memberikan masukan dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana BOS, SMPN 1 anggana menampung masukan dari guru terkait kebutuhan pembelajaran, melalui OSIS atau perwakilan siswa juga diberikan untuk memberikan masukan dalam penyusunan anggaran BOS.

Pada pengelolaan anggaran SMPN 1 Anggana mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Sekolah mempublikasikan rencana penggunaan dana BOS agar semua orang di sekolah dan masyarakat tahu. Rencana penggunaan dana BOS ini di tempel di mading sekolah agar siapapun dapat membaca informasi tersebut. Laporan dibuat rutin sesuai penggunaan anggaran. Kegiatan pelaporan sudah terbantu dengan adanya aplikasi ATKP karena setiap kegiatan yang dilakukan sudah tercatat sesuai dengan waktu pelaksanaan dan sesuai dengan waktu penganggarannya. Hal ini akan dilaporkan kepada pihak kabupaten setelah kegiatan penganggaran selesai dilaksanakan selama 6 bulan.

Adapun komponen-komponen yang dianggarkan melalui dana BOS SMPN 1 Anggana adalah kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan biaya operasional sekolah. Untuk kegiatan pembelajaran dana BOS dianggarkan untuk pembelian buku, alat peraga, dan media pembelajaran, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan kurikulum. Sedangkan untuk sarana dan prasarana anggaran dana BOS digunakan untuk perawatan gedung sekolah, perbaikan fasilitas sanitasi dan pembelian perlengkapan kantor. Penganggaran dana BOS untuk sumber daya manusia meliputi pengembangan profesionalisme guru dan pembayaran honorarium guru tidak tetap. Untuk biaya operasional sekolah dana BOS digunakan untuk pembayaran tagihan listrik, air, dan internet serta biaya administrasi.

**Tabel 1. Tabel Data Penggunaan Dana BOSP SMP Negeri 1 Anggana Tahun 2024**

No	Pos Anggaran	Anggaran Disetujui (Rp)	Realisasi Penggunaan anggaran (Rp)	Selisih	Percentase Realisasi (%)
1	Pengembangan Standar Proses	104.260.400	104.260.400	0	100%
2	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	42.550.000	42.550.000	0	100%
3	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	381.155.600	381.155.600	0	100%
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	174.724.600	174.724.600	0	100%
5	Pengembangan standar pengelolaan	82.542.000	82.542.000	0	100%
6	Pengembangan standar pembiayaan	254.482.000	254.482.000	0	100%
7	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	41.250.000	41.250.000	0	100%

Dalam pengelolaan dana BOS, SMPN 1 Anggana menggunakan prinsip efektif yaitu penggunaan dana BOS harus memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Prinsip efisien yaitu dana BOS harus digunakan secara efisien. Prinsip transparan yaitu semua langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dana BOS harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabel yaitu sekolah harus bersedia melaporkan penggunaan dana BOS kepada pihak-pihak terkait. Prinsip partisipatif yaitu setiap anggota sekolah harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana BOS.

Dengan perencanaan yang matang dan melibatkan seluruh komponen sekolah, diharapkan dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Tetapi pada pelaksanaan dilapangan sering kali proses pencairan dana BOS terlambat sehingga hal ini mengganggu kelancaran kegiatan yang memerlukan dana untuk kegiatannya. Keterlambatan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sering menjadi keluhan pihak sekolah penerima dana BOS. Hal ini pun dialami oleh SMPN 1 Anggana. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah pertama adanya proses verifikasi, sebelum dana dapat dicairkan, data sekolah harus diverifikasi, penggunaan dana sebelumnya harus diverifikasi, dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilakukan. Kedua adanya keterlambatan pelaporan, pencairan dana

pada tahap berikutnya dapat terhambat jika sekolah tidak melaporkan penggunaan dana BOS sebelumnya. Ketiga adanya kendala teknis yang disebabkan oleh masalah teknis sistem pencairan dana, seperti gangguan jaringan atau kesalahan system.

Untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pencairan dana BOS, SMPN 1 Anggana mengupayakan agar sekolah dapat memastikan bahwa semua laporan tentang penggunaan dana BOS dikirim tepat waktu. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi, dimana sekolah harus berkomunikasi dengan dinas pendidikan untuk mengetahui perkembangan pencairan dana. Berikutnya adalah sekolah menyiapkan dokumen yang lengkap sesuai dengan persyaratan pencairan dana telah selesai dan benar. Selain itu juga sekolah mencari alternatif pendanaan sementara dari koperasi sekolah atau dari kas kantin jika terjadi keterlambatan pendanaan yang cukup lama.

Kendala yang dihadapi sekolah untuk mendapatkan dana BOS adalah pada masalah birokrasi dimana adanya peraturan yang terlalu rumit dan berbelit-belit, sekolah harus menyesuaikan kegiatan yang ada di dalam aplikasi. Dan bahwa peruntukan penganggaran harus digunakan hanya untuk ítem atau kegiatan yang dianggarkan, sehingga jika ítem atau kegiatan tersebut tidak terlaksana karena alasan satu dan lain hal maka dana tersebut tidak dapat digunakan pada saat itu juga. Dana akan dapat digunakan untuk kegiatan lain setelah ada waktu untuk perubahan anggaran yang biasanya dilakukan pada bulan September. Hal ini memerlukan tenaga dan waktu untuk melakukan perubahan anggaran dan menunggu syarat pengesahan dari pengelola keuangan Kabupaten agar dana bisa cair dan dapat digunakan.

Sering kali aplikasi yang digunakan selalu meminta update sehingga ada beberapa perubahan dalam aplikasi tersebut yang memerlukan pengetahuan baru yang harus dikuasai oleh pengelola dana BOS. Pengelolaan dana BOS masih dilakukan oleh guru sehingga dalam penyusunan dan pelaporannya meminta guru tersebut dapat membagi waktunya dengan baik antara menjadi bendahara BOS dan menjadi guru pengajar di kelas.

Upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala yang ada adalah dengan bersinergi dengan pengelola sekolah lain belajar lebih lanjut mengenai input data di sekolah. Sekolah memberikan ijin pelatihan kepada pengelola BOS untuk dapat mengikuti pelatihan kepada tenaga pendidik dan kependidikan tentang pengelolaan keuangan. Mengusulkan kepada pihak pemangku pimpinan agar dapat proses birokrasi bisa lebih cepat sehingga tidak menghambat kegiatan proses pencairan dana BOS.

## **Pembahasan**

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Anggana dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Di sekolah ini, penggunaan dana BOS senantiasa didasarkan pada kesepakatan bersama yang melibatkan komite sekolah, para guru, dan kepala sekolah, di mana keseluruhan proses pengelolaannya dipublikasikan secara transparan kepada seluruh warga sekolah. Guru yang ditunjuk sebagai pengelola dana BOS memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan dana tersebut dan siap untuk mempertanggungjawabkannya. Selain itu, dana BOS dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Prinsip efektivitas ini sejalan dengan pandangan Erlangga et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana yang efektif dapat dicapai melalui perumusan tujuan yang jelas, penentuan prioritas, penjabaran tujuan ke dalam target operasional terukur, analisis berbagai alternatif cara pencapaian tujuan dengan analisis efektivitas biaya, dan perumusan rekomendasi alternatif terbaik. Lebih lanjut, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana BOS juga ditekankan oleh Anggraini (2013), yang dalam penelitiannya melengkapi laporan pengelolaan dana BOS melalui pelaksanaan program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mempertimbangkan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, penelitian Musfirah et al. (2024) menunjukkan bahwa komitmen kuat dari kepala sekolah, bendahara dana BOS, dan guru di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Meskipun mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia, komitmen bersama untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang tepat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS dan memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan siswa.

Adapun langkah-langkah yang diambil pengelola dana BOS SMPN 1 Anggana adalah dengan melakukan perencanaan dengan menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) secara rinci dan realistik dengan melibatkan komponen yang ada di sekolah. Sejalan dengan pendapat (Indiarto, et al.2023), prinsip-prinsip transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan dana BOS di SDN Cakung Barat 04 Pagi hal ini dapat dilihat dari perencanaan penggunaan dana BOS dan dapat terlihat bahwa dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah melibatkan Komite Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan dan telah dilakukan secara terbuka. Ditambahkan oleh (Anggraini, 2013), banyak pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan penganggaran dana BOS untuk program RKAS, keadaan ini dapat dilihat dari terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengontrol pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, masyarakat dengan mudah untuk menyampaikan saran, kritik, dan pendapat terkait pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS. Ditambahkan oleh (Musfirah et al, 2024) untuk menyusun RKAS, SMP N 3 Sukawati dilibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah untuk menyusun program apa saja yang akan dilaksanakan dalam RKAS selama satu tahun, sehingga melalui penyusunan tersebut dapat diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, SMP N3 Sukawati memperhatikan tidak hanya kebutuhan lembaga namun juga seberapa besar pendapatan dan pengeluaran dana BOS, sehingga pengelolaan dana BOS dapat berlangsung.

Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BOS di SMPN 1 Anggana disesuaikan dengan RKAS yang telah disusun. Dan team pengelola membuat laporannya secara berkala. Berdasarkan penelitian (Waluyo et al. 2023) Ada dua aspek pelaksanaan administrasi keuangan dana BOS di SD IT Muhammadiyah Pangkalan Kerinci yaitu penerimaan dan pengeluaran. Bantuan dana BOS diterima dari sumber pusat atau Negara sesuai dengan jumlah siswa yang terinput dalam DAPODIK, dan pengeluaran dana didasarkan pada jumlah pendapatan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang telah diajukan dalam ARKAS/RKAS. Adapun pengeluaran ini berupa belanja untuk menunjang proses belajar mengajar, ketatausahaan, sarana dan prasarana, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Ditambahkan oleh (Hidayat and Suryono 2014), penggunaan anggaran dana BOS di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo sekolah ini kurang lebih sama. Bahwa hampir separuh anggaran digunakan untuk subdisi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Kedua sekolah sama-sama mengaku berpedoman pada panduan teknis yang sudah tersedia, khususnya adanya tiga belas item yang bisa digunakan untuk dana BOS. Artinya terdapat kepatuhan dari masing-masing sekolah untuk patut pada kebijakan yang ada dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai petunjuknya.

Dalam pelaksanaan penggunaan Dana BOS, team pengelola SMPN 1 Anggana menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana BOS dan menyampaikan Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

laporan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terkait. Ditegaskan oleh (Intan and Zulkarnain 2023), pelaporan penggunaan dana BOS dibuat oleh team pengelola dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan membuat laporan keuangan sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran yang diterima dari pihak bank dan sesuai anggaran yang diajukan oleh pihak sekolah kepada pihak bank. Menurut (Intan and Zulkarnain, 2023), untuk laporan dan pertanggungjawaban ektern dana BOS SD Inpres 4 Halmahera Barat juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 karena pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS dibuat dan dikirimkan setiap triwulan dan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat (tim manajemen BOS kabupaten/kota). SD Inpres 4 Halmahera Barat bersih dari laporan catatan pengaduan dana BOS karena untuk setiap pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat selalu beritahukan atau dikirimkan kepada pihak yang berhak mengetahui dan menerima pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut. Untuk pembukuan dana BOS SD Inpres 4 Halmahera Barat hanya membuat 3 pembukuan dari 4 pembukuan dana BOS yaitu buku kas umum BOS, buku Pembantu Bank, dan buku pembantu pajak (hanya 1 triwulan). Sedangkan menurut petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 pembukuan dana BOS terdiri dari buku kas umum BOS, buku pembantu kas, buku Pembantu Bank, dan buku pembantu pajak.

Pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di SMPN 1 Anggana dilakukan oleh berbagai pihak, salah satu pengawasan secara tidak langsung adalah dengan adanya ARKAS aplikasi ini turut menjadi pengawasan awal karena jika tidak mengikuti juknis yang ada maka anggaran tidak akan disetujui. Menurut Arimbi (2022), rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah langkah awal penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. RKAS dilaksanakan melalui evaluasi akuntansi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dana BOS dari pemerintah pusat dan daerah dikelola oleh struktur RKAS. Kepala sekolah bertugas membentuk tim pengelola dana BOS, yang kemudian menyusun RKAS dengan melakukan analisis kebutuhan sekolah, melibatkan guru dan komite sekolah dalam perencanaan program dana BOS yang relevan. Salah satu tujuan penyusunan RKAS adalah untuk membuat rencana penyelenggaraan sekolah yang efektif dan efisien sehingga anggaran yang disusun dapat mencapai target sekolah. RKAS mencakup berbagai faktor, seperti sumber pendanaan, rincian kegiatan, total biaya per unit, serta total biaya kurikulum sekolah. Dengan adanya RKAS, bukan hanya tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga untuk memastikan adanya pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan dana BOS dan sumber daya yang tersedia.

Pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di SMPN 1 Anggana berikutnya adalah Komite sekolah, komite sekolah menerima laporan hasil pengusulan RKAS yang akan di sahkan oleh pihak dinas. Dalam penelitian (Hayat, et al, 2021), sebagai badan pengontrol (controling agency), komite sekolah di SMPN 1 Sendana melakukan kontrol atau pengawasan dalam pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan di SMPN 1 Sendana dengan mengontrol proses belajar mengajar, dan juga mengawasi atau mengontrol penambahan fasilitas sekolah. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Ditambahkan oleh (Ainul et al, 2019), pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh guru, komite, kepala sekolah, tim BOS sekolah, BOS Kota dan tim BOS propinsi serta inspektorat setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pengawasan dituliskan dalam laporan pertanggungjawaban setiap triwulan dan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.



Pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana BOS di sekolah adalah Kepala sekolah. Kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah beserta team pengelola dana BOS merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana BOS beserta team sapras, kurikulum dan guru yang ada di sekolah. Ditambahkan oleh (Nengsi et al. 2025), tanggungjawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah, dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilanjutkan oleh (Pardede and Simanjuntak, 2021), tanggungjawab kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS tidak diatur dalam PP No 48 tahun 2008, yang hanya mengatur tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyediaan dana pendidikan. Tanggungjawab kepala sekolah dalam pengelolaan dan BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Pasal 20 yang menyatakan dalam pengelolaan dana BOS reguler, kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah. Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggungjawab. Mengenai sanksi atas penyimpangan dan penyelewengan dana BOS diatur dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa “Tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sanksi yang dapat dijatuhan kepada kepala sekolah dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana bila ternyata melanggar KUH Pidana dan UU tentang Tipikor.

Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan kebijakan pemerintah juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan antara lain ketika pertama kali ketika sekolah melakukan pengajuan RKAS. Hasil dari inputan team BOS ke aplikasi ARKAS pada awal pengusulan diverifikasi, jika sudah lolos verifikasi maka dana BOS dapat dicairkan, untuk penggunaan dana tersebut sekolah menunggu terbitnya rekomendasi sehingga dana sudah bisa digunakan untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam RKAS dengan surat Rekomendasi. Begitu juga ketika dana sudah selesai digunakan team pengelola dana BOS harus melengkapi laporan dengan lengkap sesuai aturan yang berlaku. Sejalan dengan penelitian (Bohari and Asrin, 2024), proses pengawasan dan evaluasi maupun implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat diaudit oleh auditor eksternal maupun internal dengan hasil tidak ada temuan atau penyimpangan semua pengelolaan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Sehingga pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dari pola perencanaan (planning), pola pengorganisasian (organizing), pola pelaksanaan (Actuating) sampai pola pengawasan dan evaluasi (Controlling) yang di lakukan dengan proses dan tahapan yang sesuai dengan petunjuk dan teknis pengelolaan sehingga hasilnya berjalan dengan baik berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Makro Pembiayaan Pendidikan di SMPN 1 Anggana diambil kesimpulan sebagai berikut : Perencanaan dana BOS di SMPN 1 Anggana telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan juknis. Perencanaan ini berdasarkan evaluasi terkait kebutuhan sekolah atau skala prioritas dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite, guru dan orang tua siswa. Pada realisasi penggunaan dana BOS bila ada kegiatan yang tidak terlaksana pada waktu yang ditentukan maka dana tersebut tidak bisa digunakan langsung untuk kegiatan lain, tetapi menunggu adanya anggaran perubahan dalam RKAS sehingga dana Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

tersebut bisa digunakan di tahap 2. Dari segi pengawasan secara tidak langsung sudah digunakan aplikasi ARKAS yang didalamnya sudah terdapat rambu-rambu penggunaan dana yang boleh dianggarkan. Hasil audit internal dan eksternal tidak ditemukan penyelewengan dana Anggaran karena sudah melewati proses verifikasi dari dinas kabupaten. Dari aspek pelaporan SMPN 1 Anggana sudah sesuai dengan ketentuan. Yaitu pelaporan internal dan eksternal yang mengacu pada juknis BOS. Saran yang dapat diberikan kepada sekolah bahwa manajemen penggunaan dana BOS harus dilakukan secara terstruktur sesuai dengan tahap pencairan, sehingga akan memudahkan dalam pelaporan kepada pihak-pihak terkait. Saran kepada Dinas Pendidikan bahwa dapat mempercepat proses pencairan Dana BOS ke sekolah agar dapat segera digunakan untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rekomendasi buat penelitian selanjutnya supaya lebih menekankan pada bagaimana manajemen sekolah dalam administrasi penggunaan dana BOS teknik penyusunan RKAS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflaha, A., et al. (2021). Analisis standar pembiayaan pendidikan. *Masile =Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 24–59.
- Ainul, F., et al. (2019). Manajemen kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Pascasarjana Administrasi Pendidikan (JAP)*, 6(1), 1–6. <https://jurnal.usk.ac.id/JAP/article/view/13175>
- Anggraini, R. D. (2013). Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(2), 201–208.
- Aprilyanti, S., et al. (2024). Catatan pendidikan Indonesia: Evaluasi, solusi, & ekspektasi. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 31–34.
- Bohari, B., & Asrin, A. (2024). Pola pengelolaan dana Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan (JPAP)*, 8(1), 16–20. <https://doi.org/10.29303/jpap.v8i1.569>
- Erlangga, R. D., et al. (2024). Pengelolaan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (studi deskriptif penggunaan dana BOS sekolah). *Journal on Education*, 6(2), 10976–10983. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4886>
- Fadhila Nindita, & Riani, L. P. (2024). Menelisik problematika pembiayaan pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur.
- Hayat, M., et al. (n.d.). Kecamatan Sendana Kabupaten Majene: The role of the school committee in SMPN 1 Sendana, Sendana District, Majene, (1).
- Hidayat, R., & Suryono, A. (2014). Implementasi kebijakan penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS. *Jurnal Reformasi*, 4, 34–43.
- Hidayat, R., et al. (2023). Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan pasca Covid-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 228–241. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i2.2180>
- Intan, T. P., & Zulkarnain, Z. (2023). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 156–166. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307>
- Madjid, A., & Samsudin, M. (2021). Impact of achievement motivation and transformational leadership on teacher performance mediated by organizational commitment. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 21(3), 1–15.

- Musfirah, A. F., et al. (2024). Akuntabilitas dan transparansi dana BOS: Transformasi melalui penerapan sistem informasi akuntansi UPT SLB-E Negeri Pembina tingkat provinsi. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1848–1863. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1717>
- Mutaqin, A. H. Z., et al. (2023). Cendikia pendidikan. *Cendekia Pendidikan*, 2(6), 81–90. <https://doi.org/10.9644/scp.v1i1.332>
- Nengsi, S., et al. (2025). Pengelolaan keuangan sekolah: Sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban dalam satuan pendidikan.
- Pamungkas, A., & Tohir, A. (2022). Students' difficulties at elementary school in increasing literacy ability. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1), 1–12.
- Pardede, L., & Simanjuntak, H. (2021). Tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 1–12.
- Purba, A. W. A., et al. (2024). Problematika pembiayaan pendidikan di sekolah. *Nizhamiyah*, 14(1), 64–75. <https://doi.org/10.30821/niz.v14i1.3239>
- Rahmadoni, J. (2018). Isu global manajemen pembiayaan pendidikan di SD Indonesian Creative School Pekanbaru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(2), 161–169.
- Rahman, F. (2021). Pembiayaan makro pendidikan. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 165–172. <https://doi.org/10.32478/leadership.v2i2.714>
- Riski, A. (2018). *Pengelolaan pembiayaan pendidikan di Indonesia* (hlm. 1–8). Universitas Negeri Padang.
- Waliyah, S., et al. (2021). Manajemen pembiayaan pendidikan masa pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 77–98.
- Waluyo, T., et al. (2023). Transparansi penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>
- Yulianti, E., et al. (2017). Aliman (Prodi MAP FKIP Unib) Osa Juarsa (Prodi MAP FKIP Unib). (3), 296–303.